

Manajemen Komunikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Barru Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis *Good Governance* Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Asnita

Asnita0210@gmail.com
Universitas Muslim Indonesia

Abd Majid

Abd.majid@umi.ac.id
Universitas muslim indonesia

Muhammad Ilham

Muhammad.ilham@umi.ac.id
Univesitas Muslim Indonesia

Abstrak: penelitian ini membahas Peningkatan kualitas layanan publik di sektor pendidikan menuntut pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang efektif dan profesional. Dinas Pendidikan Kabupaten Barru memegang peran penting dalam upaya ini melalui penerapan manajemen komunikasi yang baik. Komunikasi yang terarah dan terbuka menjadi kunci dalam mendukung pengembangan SDM yang selaras dengan prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen komunikasi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barru dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) berbasis *good governance* guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya peran komunikasi organisasi dalam membentuk sistem kerja yang transparan, partisipatif, dan akuntabel sebagai dasar pengelolaan SDM yang efektif di sektor pemerintahan, khususnya dalam bidang pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pemilihan informan dilakukan melalui Teknik wawancara dan turun langsung kelapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen komunikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Barru telah mengadopsi prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam pola komunikasi internal dan eksternal organisasi. Hal ini tercermin dari adanya sistem komunikasi terbuka, pelatihan SDM secara berkala, serta forum evaluasi dan koordinasi rutin. Implementasi manajemen komunikasi tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kapasitas pegawai serta mutu pelayanan publik yang lebih profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat

Kata kunci: Manajemen Komunikasi, SDM, *Good Governace*, Pelayana Publik, Dinas Pendidikan.

Abstract: *Improving the quality of public services in the education sector requires effective and professional human resource (HR) management. The Barru Regency Education Office plays a crucial role in this effort through the implementation of sound communication management. Targeted and open communication is key to supporting HR development that aligns with good governance principles, such as transparency, accountability, and*

participation. This study aims to describe and analyze communication management implemented by the Barru Regency Education Office in developing human resources (HR) based on good governance in order to improve the quality of public services. The background of this study is based on the importance of the role of organizational communication in forming a transparent, participatory, and accountable work system as a basis for effective HR management in the government sector, especially in the field of education. This study uses a qualitative research method with informant selection carried out through interview techniques and direct field visits. The results of the study indicate that communication management at the Barru Regency Education Office has adopted the principles of good governance such as transparency, accountability, participation, and effectiveness in the organization's internal and external communication patterns. This is reflected in the existence of an open communication system, regular HR training, and routine evaluation and coordination forums. The implementation of this communication management has a positive impact on increasing employee capacity and the quality of public services that are more professional and oriented towards community needs.

Keywords: *Communication Management, Human Resources, Good Governance, Public Service, Education Office*

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu prioritas dalam reformasi birokrasi, termasuk di sektor pendidikan. Pelayanan pendidikan yang baik sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Oleh karena itu, pengelolaan SDM secara strategis dan berkelanjutan menjadi sebuah keharusan. Pentingnya komunikasi dalam sektor organisasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Barru tidak dapat dipandang sebelah mata. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan disiplin, motivasi, dan kinerja pegawai, serta memperkuat hubungan antara pimpinan dan staf.

Sebagai contoh, penerapan pendekatan humanistik dalam komunikasi organisasi telah terbukti efektif dalam meningkatkan kedisiplinan dan motivasi kerja pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Barru. Penerapan manajemen komunikasi dalam sektor pemerintahan sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya adalah jelas, akurat, dan tepat waktu. Manajemen komunikasi yang efektif dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Manajemen komunikasi sumber daya manusia dalam aspek pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan teknologi informasi dalam memilih, menyimpan, mengolah dan mengambil keputusan bidang pendidikan. Manajemen komunikasi sumber daya manusia dalam aspek pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan menafsirkan keadaan atau perkembangan aspek- aspek pendidikan berdasar data empiris yang berkonsep.

Manajemen komunikasi adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen, dimana manajemen komunikasi dalam penelitian ini terfokus atau terpusat pada dua aspek, yaitu komunikasi interpersonal dan komunikasi organisasi. Dalam penerapan manajemen komunikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, terdapat beberapa masalah yang sering muncul dan dapat menghambat efektivitas pengembangan sumber daya manusia. Masalah-masalah ini antara lain kurangnya saluran komunikasi yang efektif, informasi yang

tidak akurat, atau bahkan ketidakjelasan dalam peran dan tanggung jawab masing-masing individu hal ini dapat menyebabkan kebingungan, konflik, dan ketidakpuasan di kalangan pegawai dan masyarakat

Manajemen komunikasi merupakan aspek krusial dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintahan, termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Barru. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola dan meningkatkan mutu pendidikan, Dinas Pendidikan membutuhkan SDM yang kompeten, profesional, dan mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan serta perkembangan teknologi informasi.

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik menuntut adanya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan profesionalisme dalam pengelolaan SDM. Dalam konteks Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Manajemen komunikasi yang baik akan menciptakan sinergi antara pemangku kepentingan, sehingga pengembangan SDM dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Perkembangan dunia pendidikan yang semakin kompleks menuntut adanya peningkatan kapasitas staf melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan. Dalam konteks ini, manajemen komunikasi berperan dalam menyampaikan kebijakan, membangun budaya kerja yang positif, serta memotivasi pegawai untuk terus meningkatkan kompetensi mereka. Oleh karena itu, penelitian atau kajian mengenai manajemen komunikasi dalam pengembangan SDM berbasis *good governance* pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barru menjadi penting untuk dilakukan.

Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan, kendala yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengembangan SDM dalam lingkungan kerja pemerintahan, khususnya di sektor pendidikan. Manajemen komunikasi Perkembangan dunia pendidikan yang semakin kompleks menuntut adanya peningkatan kapasitas staf melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan. Dalam konteks ini, manajemen komunikasi berperan dalam menyampaikan kebijakan, membangun budaya kerja yang positif, serta memotivasi pegawai untuk terus meningkatkan kompetensi mereka. Oleh karena itu, penelitian atau kajian mengenai manajemen komunikasi dalam pengembangan SDM berbasis *good governance* pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barru menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan, kendala yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengembangan SDM dalam lingkungan kerja pemerintahan, khususnya di sektor pendidikan. Manajemen komunikasi memegang peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barru. Komunikasi yang efektif antara pimpinan dan staf memastikan penyampaian informasi yang jelas, koordinasi yang baik, serta peningkatan kinerja secara keseluruhan.

memegang peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barru. Komunikasi yang efektif antara pimpinan dan staf memastikan

Page 217 of 223

penyampaian Berdasarkan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Barru, pengembangan SDM dikelola oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). BKPSDM memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM yang menjadi kewenangan daerah.

Struktur organisasi BKPSDM mencakup Kepala Badan, Sekretariat dengan Subbagian Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan SDM, serta beberapa bidang lainnya yang mendukung fungsi kepegawaian dan pengembangan SDM . Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, Dinas Pendidikan Kabupaten Barru telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Salah satunya adalah "Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah" yang bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan dan manajerial. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai judul “ **Manajemen Komunikasi Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis *Good Governance* Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barru**”

METODE

JENIS PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang mengutamakan eksplorasi dan memahami suatu fenomena. Untuk memahami fenomena tersebut peneliti melakukan wawancara, memberikan pertanyaan, mengumpulkan data dan teks. Kumpulan informasi ini dianalisis dan dijabarkan. Pendekatan penelitian kualitatif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan juni – juli 2025. di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini berdasarkan peran mereka yang berkaitan langsung dengan manajemen komunikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Barru. .

NO	Nama	Jabatan
1	Suhirman, S.Pd., M.Pd	Sekretaris
2	Samsuriani, S.Sos	Kasubag Umum Dan SDM

3	Nursanti S.Sos	Staf
4	Ibrahim S.Sos	Staf

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan data yang perlu dikumpulkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode observasi non-partisipan, yaitu observasi secara langsung tetapi hanya mengamati tanpa berpartisipasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang bertujuan untuk bertukar informasi dan gagasan melalui sesi tanya jawab, sehingga dapat dibangun makna pada suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan dengan cara terstruktur untuk mengidentifikasi informasi yang bukan pakaian atau data tunggal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data penelitian dengan menggunakan berbagai dokumen baik yang tertulis maupun yang terekam. Dokumen yang tertulis bisa mencakup arsip, jurnal, autobiografi, kenang kenangan, dan lain-lain. Dokumen yang direkam dapat terdiri dari film, rekaman audio, microfilm, foto, dan sejenisnya.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis data yang bertujuan untuk menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, memperjelas, dan memfokuskan dengan mengeliminasi elemen yang kurang relevan dan menyusun serta mengatur data sedemikian rupa agar narasi presentasi data dapat dipahami dengan baik, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam reduksi data ini peneliti berusaha menemukan data yang valid sehingga ketika peneliti menyangsikan kebenaran data yang diperoleh dapat dilakukan pengecekan ulang dengan informasi yang lain dari sumber yang berbeda.

2. Penyajian Data

Sajian data merupakan kumpulan informasi yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan melakukan tindakan. Sajian data ini adalah suatu kompilasi organisasi informasi dalam bentuk deskripsi dan narasi yang menyeluruh, yang disusun berdasar pada poin-poin temuan yang ada dalam reduksi data serta disampaikan dengan bahasa peneliti yang logis dan sistematis agar mudah dimengerti.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses menafsirkan hasil dari analisis dan interpretasi data. Verifikasi terhadap kesimpulan sementara dapat dilakukan dengan mengulangi tahapan penelitian, yaitu dengan menelusuri kembali semua langkah yang telah dilakukan, termasuk pemeriksaan data yang telah dikumpulkan dari lapangan, reduksi yang dihasilkan dari catatan lapangan, dan kesimpulan sementara yang telah disusun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan membahas 2 aspek yang terkait dengan pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Peran Manajemen Komunikasi Dalam Mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Dinas Pendidikan Kabupaten Barru

Adapun peran manajemen komunikasi dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia di Dinas Pendidikan Kabupaten Barru Komunikasi sebagai Sarana Koordinasi Program dan Kebijakan, Dalam suatu organisasi publik seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, komunikasi bukan hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, melainkan merupakan elemen fundamental dalam proses koordinasi dan pengambilan keputusan. Terutama dalam

konteks pengembangan sumber daya manusia (SDM), komunikasi berperan penting dalam menyelaraskan berbagai kebijakan dan program agar berjalan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan tujuan organisasi.

Berdasarkan penelitian yang menggunakan teori komunikasi organisasi menurut Miller (2018), yang menyatakan bahwa komunikasi dalam organisasi bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi merupakan proses yang membentuk struktur, mengkoordinasikan tindakan, serta membangun hubungan antarindividu dan unit kerja. Miller menekankan bahwa koordinasi yang efektif hanya dapat tercapai jika komunikasi berlangsung secara terbuka, partisipatif, dan berkesinambungan. Dalam kerangka ini, komunikasi menjadi penghubung utama antara individu, unit kerja, serta lingkungan eksternal. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka struktur organisasi akan menjadi lemah, perintah akan disalahartikan, dan kebijakan tidak akan dapat diimplementasikan secara tepat. Dalam konteks Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, pernyataan ini sangat relevan, mengingat keberhasilan pengembangan SDM sangat bergantung pada kejelasan peran, koordinasi antarbidang, serta pemahaman bersama mengenai arah kebijakan.

Dalam organisasi publik, seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, komunikasi memainkan peran vital sebagai sarana koordinasi program dan kebijakan. Berdasarkan teori Okhuysen & Bechky (2022), tiga mekanisme koordinasi *ongoing communication, planning, dan tacit coordination* merupakan fondasi komunikasi yang efektif antar unit kerja. Komunikasi antar unit di Dinas Pendidikan masih sering bersifat top-down, sehingga informasi kebijakan tidak merata hingga sekolah di kecamatan terpencil.

komunikasi merupakan mekanisme utama untuk mengolah input (seperti regulasi pemerintah, kebijakan nasional, kebutuhan peningkatan kapasitas guru), menjadi proses internal (perencanaan program, pelaksanaan pelatihan), hingga menghasilkan output (SDM yang lebih kompeten, peningkatan kinerja pelayanan publik). Di sinilah komunikasi berfungsi sebagai penghubung antarproses, yang tanpa itu, kesinambungan organisasi akan terganggu.

Dinas Pendidikan Kabupaten Barru menjalankan fungsi koordinasi melalui mekanisme komunikasi yang bersifat formal dan informal. Komunikasi formal dilakukan melalui rapat kerja dinas, surat edaran resmi, dokumen rencana kerja, laporan pelaksanaan kegiatan, dan notulensi rapat. Sedangkan komunikasi informal berjalan melalui interaksi langsung antarpegawai, komunikasi daring melalui grup internal (seperti WhatsApp), atau diskusi spontan saat kegiatan berlangsung. Keberadaan dua bentuk komunikasi ini memberikan ruang yang lebih luas untuk membangun koordinasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kerja di lapangan. Koordinasi menjadi sangat penting, khususnya ketika dinas merancang program pengembangan SDM seperti pelatihan kepala sekolah, peningkatan kompetensi guru, workshop administrasi pendidikan, atau pelatihan digitalisasi manajemen sekolah.

2. Komunikasi Berbasis *Good Governance* Dalam Pengelolaan SDM Di Dinas Pendidikan Kabupaten Barru

Pengelolaan sumber daya manusia di instansi pemerintahan saat ini dituntut untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam konteks Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, prinsip tersebut menjadi dasar dalam membangun sistem komunikasi organisasi yang lebih terbuka, partisipatif, dan responsif. Komunikasi di sini tidak lagi dipahami semata sebagai penyampaian informasi, tetapi sebagai proses dialog timbal balik yang menghubungkan berbagai bagian organisasi dengan satu tujuan: peningkatan kualitas SDM dan pelayanan publik

Prinsip *good governance* yang diterapkan dalam komunikasi organisasi di antaranya mencakup partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta responsivitas. Berikut empat prinsip utama *Good Governance* Transparansi dalam penyampaian informasi merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama dalam lingkup organisasi publik. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, transparansi dimaknai sebagai keterbukaan organisasi dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan program pelatihan, rotasi pegawai, evaluasi kinerja, serta arah kebijakan internal lainnya yang berpengaruh langsung terhadap peningkatan kompetensi dan produktivitas pegawai.

Dalam aspek transparansi, dinas menyampaikan kebijakan SDM secara terbuka melalui berbagai media komunikasi, baik secara tertulis maupun lisan. Informasi terkait promosi, mutasi, pelatihan, hingga penilaian kinerja dapat diakses dan dikonfirmasi oleh pegawai. Transparansi ini memberikan rasa keadilan serta memperkuat kepercayaan antara pimpinan dan staf. Selain itu, proses dokumentasi dan pelaporan juga dilakukan secara tertib untuk menjaga kelancaran komunikasi antarlembaga dan pemangku kepentingan pendidikan kepercayaan antara pimpinan dan staf. Selain itu, proses dokumentasi dan pelaporan juga dilakukan secara tertib untuk menjaga kelancaran komunikasi antarlembaga dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip inti dalam *good governance*

Page 221 of 223

yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban oleh setiap individu maupun unit kerja dalam organisasi. Dalam konteks manajemen komunikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, akuntabilitas diwujudkan melalui sistem komunikasi yang tidak hanya terbuka, tetapi juga dapat ditelusuri, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas komunikasi dalam organisasi publik mencakup proses penyampaian informasi yang jelas, terdokumentasi, dan dilandasi oleh kejelasan peran dan tanggung jawab. Informasi yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya manusia, seperti penugasan pegawai, pelaksanaan pelatihan, evaluasi kinerja, serta tindak lanjut hasil evaluasi, dikomunikasikan dengan mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban, baik secara vertikal maupun horizontal. Dinas Pendidikan Kabupaten Barru menerapkan prinsip akuntabilitas ini melalui komunikasi dua arah yang melibatkan pimpinan dan staf teknis dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program SDM. Setiap kegiatan pengembangan SDM didasarkan pada data dan kebutuhan aktual yang dikomunikasikan secara formal melalui forum resmi dan dokumentasi tertulis. Dengan demikian, setiap keputusan dan kebijakan yang diambil memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun etis.

Penelitian ini menggunakan Teori komunikasi organisasi menurut Miller (2018) menekankan bahwa komunikasi yang akuntabel dalam organisasi menciptakan struktur yang memungkinkan aliran informasi dapat dievaluasi dan dilacak. Hal ini berkontribusi langsung terhadap efektivitas pengambilan keputusan serta memberikan jaminan bahwa setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Dalam pengembangan SDM, akuntabilitas komunikasi berdampak pada meningkatnya kepercayaan pegawai terhadap sistem organisasi, memperkuat etos kerja, serta memperjelas arah dan tujuan dari setiap program pelatihan. Selain itu, komunikasi yang akuntabel memudahkan proses monitoring dan evaluasi, karena setiap tahapan kegiatan telah dikomunikasikan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Partisipasi dalam proses komunikasi merupakan unsur penting dalam membangun tata kelola organisasi yang demokratis dan inklusif, terutama dalam institusi publik seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Barru. Partisipasi yang dimaksud mencakup keterlibatan aktif seluruh anggota organisasi, baik pimpinan maupun staf, dalam proses penyusunan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan dan program kerja, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Dalam kerangka *good governance*, partisipasi menjadi prinsip fundamental yang mendorong pengambilan keputusan berbasis aspirasi dan kebutuhan nyata dari pelaksana di lapangan. Melalui partisipasi, komunikasi menjadi proses dua arah yang tidak hanya mengandalkan penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan, tetapi juga memungkinkan adanya umpan balik, saran, dan kritik yang membangun dari pegawai kepada pengambil kebijakan.

Penelitian ini menggunakan teori komunikasi organisasi menurut Keyton (2021) menekankan bahwa partisipasi dalam komunikasi organisasi tidak hanya menciptakan iklim kerja yang positif, tetapi juga memperkuat kohesi internal dan mempercepat proses adaptasi terhadap perubahan. Dalam lingkungan yang partisipatif, pegawai lebih cepat merespons kebijakan baru karena merasa menjadi bagian dari proses tersebut, bukan hanya sebagai pelaksana

Dari segi responsivitas, komunikasi organisasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Barru juga mulai menunjukkan peningkatan. Permasalahan SDM yang muncul, seperti kesenjangan kompetensi, kekurangan tenaga di daerah tertentu, atau kebutuhan pelatihan khusus, dapat ditindaklanjuti dengan cepat berkat sistem komunikasi dua arah yang dibangun. Melalui laporan dari sekolah, konsultasi dengan pengawas, dan koordinasi antarbidang, dinas mampu memproses informasi secara cepat dan mengalokasikan tindakan sesuai kebutuhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan di atas Peran Manajemen Komunikasi Dalam Dinas Pendidikan Barru, komunikasi menjadi unsur utama dalam proses koordinasi antar bagian di dalam organisasi. Melalui komunikasi yang terstruktur dan terencana, setiap kebijakan serta program pengembangan sumber daya manusia dapat dijalankan secara terkoordinasi dan selaras. Rapat-rapat kerja, forum diskusi, hingga komunikasi informal antara pimpinan dan staf menjadi ruang bersama untuk menyatukan pemahaman, menyamakan langkah, serta membangun kolaborasi antarpersonel dalam organisasi. komunikasi juga berperan dalam meningkatkan responsivitas organisasi terhadap persoalan-persoalan yang muncul di internal. Ketika ada hambatan, kesalahpahaman, atau dinamika kerja yang memicu konflik, komunikasi menjadi alat untuk menjembatani dan menyelesaikannya secara cepat, untuk mendukung dalam pengembangan sumber daya manusia .

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, R., & Prasetyo, E. (2021). Strategi pengembangan sumber daya manusia melalui komunikasi organisasi. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 12(1), 45–55. <https://doi.org/10.24821/jmo.v12i1.4567>
- Hattab, S., & Daswati, R. (2023). *Manajemen sumber daya manusia modern*. Jakarta: Prenada Media
- Kaye, Michael. 1994. *Comunication Management*. Sydney: Prentice Hall
- Kettunen, P., & Kallio, J. (2021). "The Role of Good Governance in Public Sector Performance." *Public Administration Review*, 81(4), 678-690. Implementasi good governance dalam Dinas Pendidikan dapat dilakukan melalui:
- Kusuma, A. R., & Haryanto, J. T. (2019). Peran komunikasi interpersonal dalam peningkatan kinerja pegawai dinas. *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 23–31. <https://ejournal.unair.ac.id/jkkp/article/view/1234>
- Rachmawati, R. (2022). "The Role of Communication Management in Public Sector Organizations." *Journal of Public Administration Research and Theory*, 32(1), 45-67.
- Rahmawati, L., & Sari, N. P. (2022). Analisis manajemen SDM dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(3), 102–110. <https://doi.org/10.14710/jakp.v9i3.3345>
- Robbins, Stephen P., and Timothy A. Judge. *Organizational Behavior*. 18th ed., Pearson Education, 2020.

Sedarmayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen PNS*. Refika Aditama, 2017